KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Anggaran untuk Gedung DPR Disetujui
Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 8

Anggaran untuk Gedung DPR Disetujui

FAUZIAH MURSID

DPR mengklaim telah menyerahkan masalah ini kepada pemerintah.

JAKARTA — Rapat Paripurna DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 disahkan menjadi undang-undang, Rabu (25/10). Dari total belanja negara sebesar Rp 2.220,7 triliun, terdapat anggaran untuk DPR sebesar Rp 5,7 triliun.

Jumlah tersebut sudah termasuk anggaran untuk penataan Kompleks Parlemen Senayan yang meliputi pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi. "Kalau *enggak* salah itu sekitar Rp 500 miliar sampai Rp 600 miliar," ujar Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10).

Jazilul mengungkap, jumlah anggaran penataan Kompleks Parlemen Senayan masuk bagian dari anggaran yang didapatkan DPR dan Kesetjenan DPR sebesar Rp 5,7 triliun. Namun, ia tidak memerinci peruntukan dari total anggaran penataan parlemen tersebut.

"Iya, bagian dari Rp 5,7 triliun salah satunya pembangunan gedung. Cuma kalau di Banggar cuma bicara besarannya saja yang diusulkan. Sebab, yang disebut dengan RAPBN itu dibuat oleh pemerintah. Tugas DPR membahas dan memberikan persetujuan," katanya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan usai memimpin Rapat Paripurna pengesahan RUU APBN 2018 membenarkan perihal masuknya anggaran untuk penataan Kompleks Parlemen Senayan dalam APBN 2018. Namun, menurut dia, DPR telah menyerahkan soal pembangunan gedung baru DPR kepada pemerintah.

Taufik mengatakan, hal tersebut juga sudah disampaikan secara langsung pada saat rapat konsultasi juga antara pimpinan DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa kali. "Prinsipnya DPR menginginkan agar masalah fasilitas pembangunan gedung DPR itu prinsipnya itu milik negara. Dalam hal ini memang dari perencanaan, pembahasan, DPR sudah menyerahkan ke Kementerian PUPR dan Kesekjenanan DPR," ujarnya.

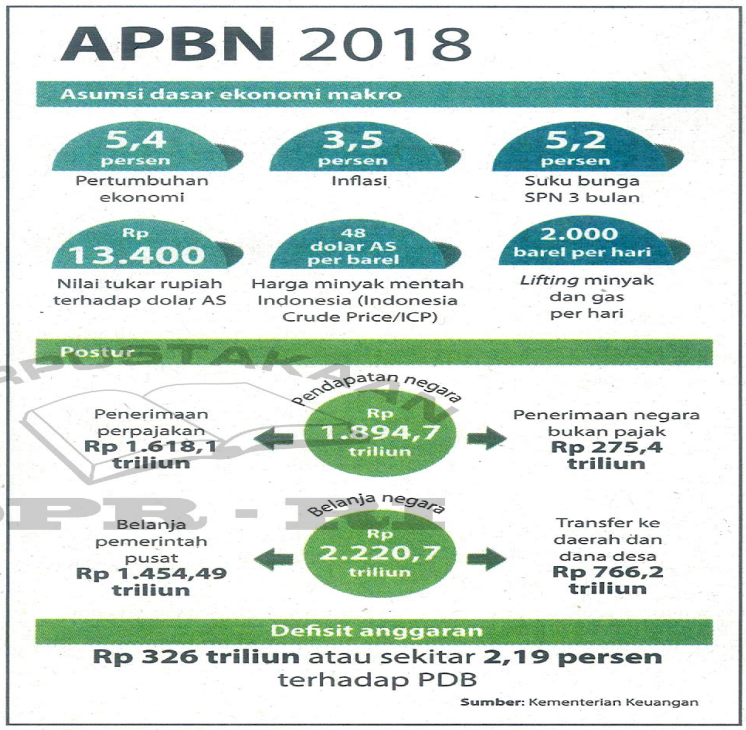

Sebelumnya, dalam rencana penataan Kompleks Parlemen Senayan yang mengemuka di dalamnya terdapat pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi. Disebut-sebut, pembangunan gedung tahap awal rencananya akan menelan biaya sekitar Rp 320 miliar dari anggaran yang diajukan DPR untuk 2018, yaitu Rp 5,7 triliun. Sementara, anggaran untuk membangun alun-alun demokrasi sebesar Rp 280 miliar. Dengan begitu, jika ditotal, keduanya sekitar Rp 600 miliar.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing berdalih gedung yang ada sekarang kondisinya tidak layak dan sudah tidak dapat menampung anggota DPR dan staf yang masing-masing berjumlah delapan orang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, alokasi anggaran untuk DPR dalam APBN 2018 tidak mengalami perubahan, yakni Rp 5,7 triliun. "Yang diatur pemerintah biasanya hanya standar biayanya," katanya.

Sementara untuk detail penggunaan anggaran, termasuk pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi, inisiatifnya berasal dari DPR. "Jadi, tidak ada pembahasan di komisi-komisi DPR. Berbeda dengan kementerian/lembaga," ujar Menkeu.

■ ed: muhammad iqbal